

BAB V

PENUTUP

Penelitian ini bertujuan untuk melihat penggunaan analisis wacana Roger Fowler pada teks Twitter Partai Gerindra berdasarkan kosakata dan tata bahasa dan untuk melihat ideologi wacana dominan di balik topik pembahasan LGBT yang dilakukan Partai Gerindra maupun yang digunakan oleh masyarakat yang menanggapi.

5.1 Simpulan

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) penggunaan analisis wacana kritis Roger Fowler berdasarkan kosakata dan tata bahasa menunjukkan adanya kosakata dan tata bahasa yang positif maupun negatif, kecuali pada kosakata marjinalisasi di mana marjinalisasi sudah merupakan hal yang negatif. Pada kosakata dan tata bahasa yang positif menunjukkan penggunaan kosakata yang menunjukkan dukungan Partai Gerindra untuk kelompok LGBT, dan untuk kosakata dan tata bahasa yang negatif menunjukkan penggunaan kosakata Partai Gerindra yang meminggirkan dan memojokkan kelompok LGBT; (2) ideologi wacana dominan yang digunakan baik oleh Partai Gerindra maupun pembaca yang menanggapi yaitu menggunakan wacana agama untuk menolak keberadaan kelompok LGBT.

5.2 Implikasi

5.2.1 Implikasi Teoritis

Penelitian ini dilakukan untuk menjawab dua tujuan pokok penelitian, yaitu untuk melihat penggunaan analisis wacana dalam teks yang disampaikan oleh Partai Gerindra berdasarkan tata bahasa dan kosakata Roger Fowler dan untuk melihat ideologi wacana dominan di balik topik pembahasan LGBT yang dilakukan Partai Gerindra maupun yang digunakan oleh masyarakat yang menanggapi.

Wacana *tweet* yang dibangun oleh Partai Gerindra dalam menanggapi pernyataan Kejaksaan Agung diteliti menggunakan *critical discourse analysis* Roger Fowler, dengan instrumen wacana hukum dan politik, agama, dan sosial berdasarkan kosakata dan tata bahasa yang digunakan. Partai Gerindra berusaha melakukan pembelaan hak-hak kelompok LGBT sesuai dengan wacana

hukum dan politik, di mana mereka menggunakan beberapa kosakata seperti contohnya “hak” sebagai klasifikasi bahwa LGBT merupakan kelompok yang memiliki hak-hak sebagai warga negara untuk memiliki pekerjaan yang layak. Dalam analisis wacana kosakata positif menggambarkan bahwa Partai Gerindra menjadi aktor yang membela kelompok LGBT untuk menyuarakan haknya dalam mendapatkan pekerjaan. Meskipun demikian, di saat yang bersamaan terjadi kontradiksi di beberapa tweet mereka yang membuat Partai Gerindra menjadi aktor yang menjatuhkan atau meminggirkan kelompok LGBT. Hal ini terlihat jelas dari bagaimana Partai Gerindra yang awalnya beberapa kali menggunakan kosakata yang dengan tegas melambangkan ketidakadilan yang dialami oleh kelompok LGBT dengan menggunakan hukum sebagai landasan wacana mereka, tetapi kemudian berubah karena banyak pengguna Twitter yang mengasosiasikan mereka dengan mendukung kelompok LGBT. Hal tersebut bukan hanya terlihat dari beberapa kosakata negatif yang digunakan dalam wacana hukum dan politik saja, tetapi juga dalam wacana agama seperti sebutannya terhadap LGBT yang “haram” dan “laknat”, serta wacana sosial seperti LGBT yang dianggap “berdampak bagi kesehatan”. Sikap Partai Gerindra tersebut menunjukkan bahwa mereka takut kehilangan pendukung yang mayoritas menolak keberadaan LGBT dan menganut ideologi agama mayoritas yang sama. Sikap kontradiktif dalam hal hukum, agama, maupun sosial terlihat jelas dalam kosakata-kosakata yang mereka gunakan dalam tweet mereka.

Sikap kontradiktif Partai Gerindra dalam wacana hukum adalah di satu sisi Partai Gerindra memedulikan kelompok LGBT yang seharusnya mendapatkan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak seperti masyarakat lainnya, tetapi di sisi lain Partai Gerindra menuntut pemerintah membuat aturan atau hukum khusus untuk kelompok LGBT seakan-akan mereka dibedakan “kasta”nya dari masyarakat lainnya. Kemudian sikap kontradiktif dalam wacana agama adalah kosakata positif yang digunakan Partai Gerindra dalam memberikan contoh sikap kasih sayang tanpa diskriminasi Nabi Muhammad kepada masyarakat agar tidak membedakan sesama manusia, termasuk di dalamnya kelompok LGBT. Meskipun demikian, di sisi lain mereka dengan jelas menyebut kelompok LGBT dengan sebutan-sebutan seperti “haram”, “laknat”, dan sebagainya yang mana membatasi pandangan pengguna Twitter lain untuk melakukan marjinalisasi terhadap kelompok LGBT. Sedangkan sikap kontradiktif Partai Gerindra dalam wacana sosial adalah dalam kosakata positif yang digunakan seperti “polemik LGBT” di mana mereka menunjukkan kesediaan untuk mengangkat isu LGBT di ruang publik

dan menganggap orang-orang dari kelompok LGBT merupakan bagian dari masyarakat atau warga negara Indonesia. Akan tetapi di sisi lain Partai Gerindra melarang kelompok LGBT untuk mengekspresikan diri, hingga tidak menganggap keberadaan kelompok tersebut. Hal ini terlihat dari kosakata negatif yang digunakan seperti “menolak perilaku” dan “tidak mendukung perilaku”.

Meskipun terdapat beberapa kontradiksi Partai Gerindra terkait ideologi yang mereka anut. Keberanian sikap Partai Gerindra dalam membawa topik pembahasan ini ke ruang publik merupakan sesuatu yang patut diacungi jempol mengingat tidak banyak orang-orang pemerintahan atau pejabat publik yang membicarakan tentang hal ini, apalagi di ruang publik. Partai Gerindra menjadi partai kedua setelah PSI yang berani membicarakan tentang LGBT yang dimulai dengan wacana positif, meskipun beberapa tanggapan mereka kepada pengguna Twitter tidak sesuai dengan pernyataan awal mereka. Penelitian ini tidak hanya menganalisis bagaimana wacana Partai Gerindra dalam membicarakan LGBT sebagai topik dalam Twitter mereka dan ideologi yang ditunjukkan oleh mereka tetapi juga menjelaskan bahwa kelompok LGBT semakin direpresi dalam pembahasan tersebut.

Penulis telah menganalisis seluruh teks dari akun resmi Twitter Partai Gerindra yang membahas tentang LGBT pada tanggal 28 November 2019, dengan menggunakan instrumen wacana hukum dan politik, wacana agama, serta wacana sosial. Dari analisis tersebut, penulis mengambil kesimpulan bahwa Partai Gerindra tidak memiliki pendirian teguh atas apa yang mereka sampaikan. Dengan sikap kontradiktif yang ditunjukkan oleh Partai Gerindra dapat menyebabkan semakin meningkatnya diskriminasi dan persekusi yang didapatkan kelompok LGBT. Selain itu, kurangnya edukasi yang didapatkan ataupun yang dapat diakses oleh masyarakat mengenai identitas gender dan orientasi seksual LGBT+ juga ikut mempengaruhi ideologi beberapa pengguna twitter. Hal-hal tersebut tentu saja membuat masyarakat semakin memandang sebelah mata kepada kelompok LGBT dan memperkuat stigma negatif kelompok LGBT.

Hasil diskusi yang ditunjukkan semakin memperlihatkan bagaimana wacana mengenai LGBT direpresentasikan dalam ranah politik, yaitu hanya dijadikan objek politik demi kepentingan pejabat publik. Apabila dilihat secara sekilas Partai Gerindra menunjukkan sikap yang inklusif dengan membahas mengenai isu kelompok minoritas, tetapi sama seperti pembahasan LGBT dalam ranah politik umumnya, diskusi tersebut tidak terselesaikan dengan

baik dan meninggalkan jejak-jejak diskriminatif terhadap kelompok LGBT. Partai Gerindra yang seharusnya dapat menjadi jembatan antara kelompok minoritas tersebut dengan instansi pemerintahan agar dapat membuat aturan tentang perlindungan hukum bagi mereka, malah memberikan ruang kepada masyarakat yang kontra terhadap LGBT untuk semakin mendiskriminasi dan mempersekusi mereka.

Papacharissi (dalam Fatah dan Fatanti, 2019:312) menegaskan bahwa *a virtual space enhances discussion; a virtual sphere enhances democracy*, yang artinya bahwa internet dapat difungsikan lebih dari sekedar medium, yaitu sebagai bentuk demokrasi. Tetapi yang terjadi diskusi wacana tentang minoritas ini tetap tidak dapat menembus ideologi mayoritas masyarakat Indonesia, bahkan dalam ruang virtual. Penggunaan teori ruang publik milik Habermas menunjukkan bahwa dalam diskusi ini kuasa ada berada di tangan masyarakat, di mana masyarakat ‘melawan’ Partai Gerindra menggunakan ideologi dominan yaitu agama, khususnya agama Islam. Pada akhirnya ruang publik yang seharusnya ideal karena telah memenuhi syarat-syarat yang baik, menjadi tidak ideal karena hanya berpihak kepada satu sisi saja, yaitu sisi masyarakat yang tidak mendukung kelompok LGBT. Sedangkan kelompok minoritas tersebut semakin termarjinalkan keberadaannya karena diskusi Partai Gerindra tersebut berakhir dengan ketidakberpihakan kepada kelompok LGBT.

5.2.2 Implikasi Praktis

Penulis ingin memberikan saran, yang pertama kepada Partai Gerindra agar lebih berhati-hati dalam pemilihan penggunaan kosakata atau kalimat. Maksud Partai Gerindra untuk menyuarakan hak yang semestinya didapatkan kelompok LGBT sebagai warga negara adalah maksud yang baik karena tidak diskriminatif terhadap suatu kelompok. Tujuannya untuk membawa ke ruang publik agar dapat didiskusikan dengan masyarakat luas juga merupakan hal yang baik karena melibatkan banyak pandangan. Namun pilihan kata yang digunakan banyak yang justru memojokkan dan memarjinalkan kelompok tersebut. Diskusinya dalam ruang publik pun terkesan menjadi salah sasaran karena mayoritas pengguna Twitter yang menanggapi adalah pengikut Partai Gerindra yang menolak keberadaan kelompok tersebut. Akan lebih baik apabila diskusi juga melibatkan orang-orang dari kelompok LGBT agar bisa lebih didengarkan suara dan kebutuhannya.

Saran yang ke dua adalah untuk masyarakat luas agar tidak mudah terprovokasi dengan hal-hal yang sekiranya negatif, apalagi bila menyangkut tindakan diskriminasi atau persekusi terhadap kelompok tertentu, khususnya kelompok LGBT. Harus lebih banyak memahami hal-hal seperti SOGIESC (*Sexual Orientation, Gender Identity, Expression, and Sex Characteristic*) untuk paham bahwa LGBT bukan lah penyakit yang bisa dihindari dan disembuhkan.

5.2.3 Implikasi Sosial

Partai Gerindra seharusnya memiliki peran yang sangat penting dalam mengedukasi dan menginformasikan kepada masyarakat luas mengenai identitas gender dan orientasi seksual LGBT serta haknya dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Namun karena ketakutan kehilangan pendukung yang mayoritas mengecam LGBT, membuat Partai Gerindra pada akhirnya menyerah dan menuruti wacana dominan. Sebuah momen yang dapat menjadi perubahan bagi orang-orang dari kelompok LGBT di Indonesia, harus kandas karena pendirian yang mudah untuk diubah tersebut. Partai Gerindra yang dapat membantu merepresentasikan kelompok LGBT, tetap menjadi representasi masyarakat mayoritas dengan ideologi menolak LGBT.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, wacana bahwa LGBT adalah penyakit ataupun dapat mengundang bencana masih menjadi pegangan masyarakat. Maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran dan menjadi masukan bagi pemerintah maupun penegak hukum agar lebih objektif dalam melihat realitas. Melakukan perlindungan hukum kepada orang-orang yang didiskriminasi dan dipersekusi, termasuk orang-orang dari kelompok LGBT, sesuai dengan amanat UUD 1945 pasal 27 ayat 1, karena mereka juga bagian dari warga negara Indonesia. Dengan penelitian ini juga semoga masyarakat lebih membuka mata atas ketidakadilan yang salah yang dilakukan terhadap kelompok LGBT selama ini.

5.3 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini menganalisis wacana dari tweet Partai Gerindra pada akun resmi Twitter mereka yang membahas tentang hak kerja kelompok LGBT pada tanggal 29 November 2019. Keterbatasan pada penelitian ini terletak pada proses pengambilan data untuk unit analisis karena beberapa tweet tanggapan pembaca ada yang sudah dihapus dan datanya telah hilang. Meskipun

tanggapan Partai Gerindra masih ada, tapi penulis tidak sempat melihat apa yang di-posting oleh pembaca tersebut.

Penulis pada awalnya ingin menggunakan analisis wacana kritis dari Norman Fairclough agar dapat menganalisis lebih dalam lagi perihal wacana yang dimaksud oleh Partai Gerindra. Namun karena sulitnya penulis dalam menghubungi pihak narasumber, yaitu Partai Gerindra, maka penulis memutuskan untuk mengubah analisis menjadi analisis wacana kritis milik Roger Fowler dan kawan-kawan.